

## ABSTRAK

Nama : Parlindungan Satria  
Npm : 01659210055  
Judul : Kedudukan Hukum Seseorang Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Komputer.

Pada zaman ini dunia dihadapkan dengan kemajuan teknologi informasi yang memberikan perbedaan dengan zaman dahulu. Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi memberikan dampak baik dan juga dampak buruk, oleh karena itu pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Atau dikenal dengan UU ITE. Bahwa dalam UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang yaitu ilegal akses. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait ilegal akses melalui dua putusan pengadilan negeri yang penulis kaji yaitu Studi Putusan Nomor: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst. dan Studi Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketersediaan dan penerapan hukum terkait ilegal akses berdasarkan UU ITE. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan Teknik studi Pustaka dan mengkaji teori-teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa ketersediaan dan penerapan hukum terkait ilegal akses tidak mengandung kepastian hukum dan keadilan, karena pasal-pasal yang tertuang dalam UU ITE multitafsir. Selanjutnya kesimpulan penulis bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Atau dikenal dengan UU ITE mengandung pasal-pasal yang multitafsir khususnya pada pasal 30 Ayat 1,2,dan 3. Kemudian analisa aparat penegak hukum yang belum sempurna dalam menerapkan UU ITE ini pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan oleh majelis hakim. Sehingga perlu kajian dan revisi terhadap UU ITE ini khususnya pasal terkait ilegal akses, dan peningkatan kemampuan pada aparat penegak hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci : **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Ilegal akses,**

## ABSTRACT

**Name** : Parlindungan Satria  
**Student ID** : 01659210055  
**Title.** : *Legal Status Of A Person In Accesing Other People's  
Electronic System On Computer.*

*At this time the world is faced with advances in information technology that makes a difference from the past. Information technology and electronic media are considered as symbols of pioneers, which will integrate the entire world system, both in social, cultural, economic and financial aspects. With the development of technology, it has both good and bad impacts, therefore the government made Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Otherwise known as UU ITE. Whereas the ITE Law regulates actions that are prohibited, namely illegal access. In this study, the authors conducted research related to illegal access through two district court decisions that the authors reviewed, namely Decision Study Number: 414/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst. and Decision Study Number: 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli. This study aims to examine the availability and application of laws related to illegal access under the ITE Law. This research was carried out using normative juridical research with library study techniques and studying theories, concepts, and laws and regulations. Based on the results of the author's research that the availability and application of laws related to illegal access does not contain legal certainty and justice, because the articles contained in the ITE Law have multiple interpretations. Furthermore, the author's conclusion is that Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Otherwise known as the ITE Law, it contains articles that have multiple interpretations, especially in Article 30 Paragraphs 1, 2, and 3. Then the analysis of law enforcement officials who have not been perfect in implementing the ITE Law is at the stage of investigation, investigation, prosecution, up to the decision by the panel of judges. So that it is necessary to study and revise the ITE Law, especially the articles related to illegal access, and increase the capacity of law enforcement officials to create legal certainty and justice for all Indonesian people.*

**Keyword** : *Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Illegal Access.*